

Pembebasan Lahan Masih Hambat Proyek Jalan

JAKARTA. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah meluncurkan banyak proyek infrastruktur jalan raya, baik yang berupa jalan tol maupun non tol, tapi hasilnya nihil. Dari hasil evaluasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), proyek tersebut terhambat oleh susahnya proses pembebasan lahan.

Direktur Pengaturan Pengadaan Tanah BPN Noor Marzuki mencatat, dari 126 titik pembangunan jalan tol dan nontol, rata-rata pembebasan lahan hanya baru mencapai 30%. Bahkan, beberapa titik ada yang pembebasan lahan baru 4%. Padahal, pengadaan lahan sudah berlangsung sejak tahun 2008.

Menurut Noor, kendala pembebasan lahan karena banyak masyarakat yang keberatan. Padahal, nilai ganti rugi kepada masyarakat ditentukan tim *appraisal* independen tanpa campur tangan pemerintah. "Bersamaan itu, masyarakat pun bisa meminta pilihan ganti rugi yakni uang, relokasi tempat tinggal, atau saham di proyek pembangunan tersebut," ucap Noor, Rabu (25/6).

Pembebasan lahan baru diyakini bakal berjalan lebih mudah mulai tahun 2014 saat Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sudah berlaku. Dengan UU itu, pembebasan lahan lebih jelas dan mudah karena ada sanksi tegas bagi masyarakat yang menolaknya.

Tapi, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan International Fachry Thalib masih sanksi pembebasan lahan bisa lancar. Sebab, tanpa tindakan tegas pemerintah, UU baru tidak akan berarti.

Fahriyadi